

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING**  
**PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

MEMORANDUM  
NOMOR 515/DJPDSPKP.2/RC.610/VII/2025

Yth. : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing  
Produk Kelautan dan Perikanan  
Dari : Direktur Logistik  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Periode TW II Direktorat Logistik  
TA 2025  
Lampiran : Satu Berkas  
Tanggal : 21 Juli 2025

---

Sehubungan telah selesainya kegiatan pada Direktorat Logistik periode TW II Tahun Anggaran 2025 dan mekanisme pelaporan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berikut terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja TW II Tahun Anggaran 2025.

Demikian disampaikan, atas berkenaan dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**Berny A. Subki**

Tembusan :  
Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

2025

Direktorat Logistik  
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk  
Kelautan dan Perikanan

DITJEN PDSPKP



#Logistics4competitiveness

#KITAPDS

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2025, adalah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 dan Target Kinerja Direktorat Logistik Tahun 2025 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Logistik. Kegiatan utama level 2 yang mendukung program utama level 1 (Kinerja Logistik Ikan Nasional) adalah (1) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan; (2) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; (3) Kinerja Logistik Ikan; (4) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku; (5) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri; (6) Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik; (7) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik; (8) Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik; (9) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik; (10) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik; (11) Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik. Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Triwulan II sebesar 107,62

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Direktorat Logistik.

Jakarta, 8 Juli 2025

Direktur Logistik



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Berny A. Subki**

## **TIM PENYUSUN**

### **PENGARAH**

Direktur Logistik

### **PENYUSUN**

Tim Penyusunan Pelaporan Direktorat Logistik

### **KONTRIBUTOR**

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Logistik selama Triwulan II Tahun 2025, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Direktorat Logistik melakukan pengukuran terhadap kegiatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut: (1) Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan (2) Meningkatnya Kinerja Logistik Ikan Dalam Negeri, dan (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Logistik dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 4 IKK bersifat tahunan, 6 IKK bersifat triwulan dan 1 IKK bersifat semesteran.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan meliputi : Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik, Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik. Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik, Untuk indikator yang bersifat triwulan meliputi Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan, Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kinerja Logistik Ikan, Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, seluruh Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Logistik mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan aplikasi kinerja KKP, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Triwulan II adalah sebesar 107,62. Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang ditargetkan pada Triwulan II. Adapun rincian sebagai berikut :

- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen); target 9,5 Persen; capaian 15,15 Persen atau 120% dari target;
- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Persen); target 8 Persen; capaian 8 Persen atau 100% dari target;
- IKK Kinerja Logistik Ikan (Indeks); target 72 Indeks; capaian 72,53 Indeks atau 100,74% dari target;
- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku; target 10 Persen; capaian 11,7 Persen atau 117% dari target;
- IKK Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri; target 90 Persen; capaian 97,3 Persen atau 108,11% dari target;
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik; target 95 Persen; capaian 100 Persen atau 105,26% dari target;
- IKK Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik (Indeks); target 82 Indeks; capaian 84,65 Indeks atau 103,23% dari target;

Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 02 Desember 2024, Direktorat Logistik mempunyai Pagu awal Rp.5.856.950.000,-. Jika berdasarkan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dan DIPA Rev 1 Nomor SP DIPA-032.06.1.622131/2025 tanggal 22 Februari 2025, Direktorat Logistik mendapatkan pagu sebesar Rp. 1.797.575.500,- dengan tagging blokir sebesar Rp. 1.114.962.500,- sehingga pagu efektif setelah efisiensi sebesar Rp.682.613.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 472.698.148,- atau sebesar 69,25% terhadap pagu setelah efektif efisiensi, dan 8,07% terhadap pagu awal.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang logistik yang telah dicapai selama Triwulan II Tahun 2025 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi,

diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di Triwulan selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan II Tahun 2025, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

# DAFTAR ISI

|                                         | Halaman    |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>             | <b>i</b>   |
| <b>TIM PENYUSUN.....</b>                | <b>ii</b>  |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>          | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>              | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>               | <b>ix</b>  |
| <b>I. PENDAHULUAN.....</b>              | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                | 1          |
| 1.2 Maksud dan Tujuan .....             | 2          |
| 1.3 Tugas dan Fungsi .....              | 2          |
| 1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia .....  | 4          |
| 1.5 Permasalahan Utama .....            | 4          |
| 1.6 Sistematika Penyajian .....         | 5          |
| <b>II. Perencanaan Kinerja .....</b>    | <b>7</b>   |
| 2.1 Rencana Strategis .....             | 7          |
| 2.1.1 Sasaran Kegiatan .....            | 8          |
| 2.1.2 Kebijakan .....                   | 8          |
| 2.2 Perjanjian Kinerja .....            | 8          |
| <b>III. Akuntabilitas Kinerja.....</b>  | <b>10</b>  |
| 3.1 Capaian Kinerja .....               | 10         |
| 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja ..... | 12         |
| 3.3 Realisasi Anggaran .....            | 50         |
| <b>IV. Penutup .....</b>                | <b>52</b>  |
| 4.1. Kesimpulan.....                    | 52         |
| <b>V. Lampiran .....</b>                | <b>54</b>  |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar     | Judul                                                                                                                                                                       | Hal |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1.  | Pembahasan Teknis STELINA dan TraceTales .....                                                                                                                              | 14  |
| Gambar 2.  | Pertemuan KICK-OFF EVENT STELINA GDST PROJECT .....                                                                                                                         | 15  |
| Gambar 3.  | Day Zero Kick-off Event STELINA .....                                                                                                                                       | 16  |
| Gambar 4.  | Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) .....                                                                              | 17  |
| Gambar 5.  | Sosialisasi Sistem Resi Gudang Komoditas Udang .....                                                                                                                        | 18  |
| Gambar 6.  | Sosialisasi Pembinaan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) dan Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan (CDIB) .....                                                            | 21  |
| Gambar 7.  | Sosialisasi Sertifikasi SPDI dan Pendampingan Penyusunan Panduan Mutu dan SKP Bagi Supplier Yang Memasok Bahan Baku ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa .....   | 22  |
| Gambar 8.  | Simulasi Penilaian Penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) .....                                                                                                    | 23  |
| Gambar 9.  | Sosialisasi Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) serta Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan CDIB ..... | 24  |
| Gambar 10. | Pembahasan Kuesioner Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) .....                                                                                                              | 27  |
| Gambar 11. | Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) .....                                                                                       | 28  |
| Gambar 12. | Koordinasi akselerasi penerapan kelayakan penyimpanan pada Gudang Beku (Cold Storage) Bantuan Pemerintah .....                                                              | 32  |
| Gambar 13. | Monitoring implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Cold Storage (SIP-CS) dan pemantauan penerapan kelayakan gudang beku di Karawang .....                                 | 33  |

|            |                                                                                                                                                    |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 14. | Monitoring Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Cold Storage (SIP-CS) dan Pemantauan Penerapan Kelayakan Gudang Beku Bantuan Pemerintah ..... | 34 |
| Gambar 15. | Bimtek Penerapan Kelayakan Gudang Beku .....                                                                                                       | 35 |
| Gambar 16. | Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Cold Storage (SIP-CS) .....                                                                              | 37 |
| Gambar 17. | Penyusunan dashboard kinerja impor hasil perikanan melalui mekanisme Neraca Komoditas .....                                                        | 39 |
| Gambar 18. | Menghadiri kegiatan BAPANAS, Koordinasi Teknis Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Progres Pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah .....             | 40 |
| Gambar 19. | Koordinasi Aliran Data SINAS NK .....                                                                                                              | 41 |
| Gambar 20. | Koordinasi Penyusunan Masukan terhadap Permenko Bidang Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan .....                            | 42 |
| Gambar 21. | Gambar 21. Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Refrigerasi dan Gudang Beku Portable .....                                   | 46 |

## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b> | <b>Judul</b>                                                                              | <b>Hal</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tabel 1.     | Perjanjian Kinerja Tahun 2025<br>Direktorat Logistik .....                                | 9          |
| Tabel 2.     | Ikhtisar Pencapaian Kinerja<br>Direktorat Logistik Periode<br>Triwulan I Tahun 2025 ..... | 11         |
| Tabel 3.     | Target dan capaian IK 1 .....                                                             | 13         |
| Tabel 4.     | Target dan capaian IK 2 .....                                                             | 19         |
| Tabel 5.     | Target dan capaian IK 3 .....                                                             | 25         |
| Tabel 6.     | Target dan capaian IK 4 .....                                                             | 30         |
| Tabel 7.     | Target dan capaian IK 5 .....                                                             | 37         |
| Tabel 8.     | Target dan capaian IK 6 .....                                                             | 43         |
| Tabel 9.     | Target dan capaian IK 7 .....                                                             | 46         |
| Tabel 10.    | Target dan capaian IK 8 .....                                                             | 47         |
| Tabel 11.    | Target dan capaian IK 9 .....                                                             | 48         |
| Tabel 12.    | Target dan capaian IK 10 .....                                                            | 49         |
| Tabel 13.    | Target dan capaian IK 11 .....                                                            | 50         |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas yaitu :

1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Logistik.

Sebagai wujud implementasi Peraturan dimaksud, dibutuhkan rencana kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Logistik termasuk dalam dokumen perencanaan kinerja yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Rencana kinerja tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan, Direktorat Logistik mengacu pada Rencana Strategis (Rancangan Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tahun 2025-2029. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Direktorat Logistik telah membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Logistik sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rancangan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Logistik telah menyusun Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2025. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan II Tahun 2025.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2025 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan II Tahun 2025 dan bagaimana proses pencapaiannya.

## **1.3 Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas yaitu :

1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;

5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana logistik ikan nasional, serta pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Logistik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Logistik menyelenggarakan fungsi: perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan. Selain itu Direktorat Logistik memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan administrasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 178/DJPDSPKP.0/OT.320/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, telah disepakati Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP. Adapun Tim Kerja lingkup Direktorat Logistik sebagai berikut :

Direktorat Logistik dipimpin oleh seorang Direktur dan terdiri atas:

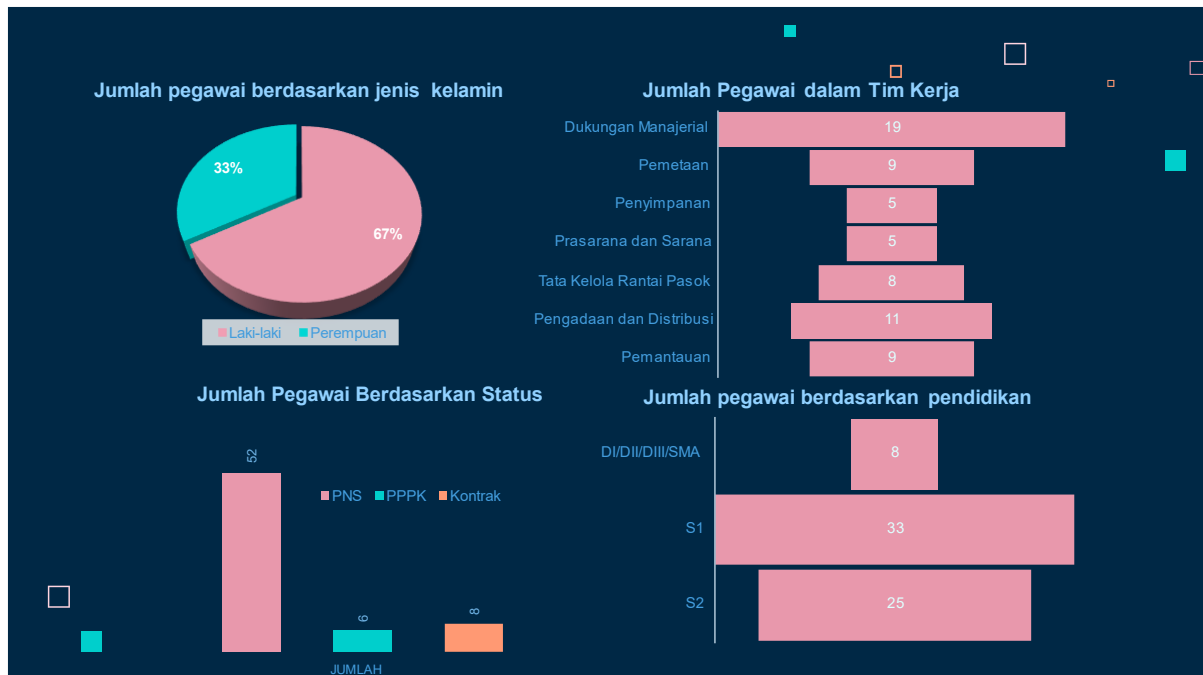
1. Tim Kerja Pemetaan;
2. Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok;
3. Tim Kerja Pengadaan, dan Distribusi;
4. Tim Kerja Penyimpanan;
5. Tim Kerja Pemantauan;
6. Tim Kerja Prasarana dan Sarana, dan
7. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

#### **1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia**

Pada Triwulan II Tahun 2025, Direktorat Logistik memiliki total 64 pegawai, terdiri dari 40 laki-laki dan 24 perempuan. Dari total pegawai tersebut, sebanyak 50 orang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 8 orang lainnya merupakan tenaga kontrak. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Direktorat Logistik memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (sarjana) sebanyak 33 orang, diikuti oleh latar belakang pendidikan Magister (S2) sebanyak 23 orang, dan latar belakang pendidikan Diploma (DI/DII/DIII/SMA) sebanyak 8 orang.

Tim Kerja Direktorat Logistik memiliki struktur sebagai berikut: Timja Dukungan Manajerial memiliki pegawai terbanyak dengan jumlah 17 orang, disusul oleh Timja Pengadaan dan Distribusi dengan 10 orang, Timja Prasarana memiliki 6 Orang, Timja

Pemantauan masing-masing memiliki 8 orang, Timja Tata Kelola Rantai Pasok memiliki 8 orang serta Timja Penyimpanan masing-masing memiliki 6 orang.



**Gambar 1. Keragaan Sumber Daya Manusia**

### 1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang menjadi isu aktual logistik hasil kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya implementasi program penguatan logistik hasil kelautan dan perikanan, antara lain :

1. *Mismatch* Produksi dan Industri, serta Konsumen
2. Belum memadainya sarana dan prasarana di sentra produksi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
3. Belum optimalnya kelembagaan yang dapat memanfaatkan sarpras pasca panen yang tersedia;
4. Tidak meratanya potensi sumberdaya perikanan tangkap di wilayah timur dan wilayah barat;
5. Lebih majunya perkembangan ekonomi dan ketersediaan fasilitas di wilayah barat dibandingkan wilayah timur, sehingga sebagian besar investasi perikanan banyak terdapat di wilayah barat;
6. Lebih berkembangnya potensi perikanan budidaya di wilayah barat dibandingkan di wilayah timur, karena didukung faktor tarikan pasar atau permintaan yang tinggi, infrastruktur dasar yang memadai, baik ketersediaan input produksi seperti benih, pakan dan obat-obatan maupun dukungan sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi, komunikasi dan lain-lain;

7. Adanya disparitas harga ikan di wilayah barat dan wilayah timur yang menjadi kendala jika ada rencana untuk memasarkan ikan dari wilayah Timur, yang produksinya cukup tinggi namun permintaannya rendah, ke wilayah Barat yang permintaannya tinggi, mengingat jumlah penduduk yang jauh lebih banyak;
8. Tidak tersedianya informasi mengenai pasokan dan permintaan yang memadai, sehingga sering terjadi pasokan di suatu daerah menjadi berlimpah pada suatu waktu, namun pada waktu yang lain pasokan sangat minim. Hal ini terjadi karena tidak adanya sistem informasi yang terkoneksi antara daerah produksi yang tersebar dengan daerah konsumsi yang umumnya berada di kota-kota besar.
9. Belum optimalnya Pengelolaan gudang beku (BMN) yang dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung.
10. Pengaruh Krisis Iklim, Perubahan iklim global menyebabkan perubahan suhu air laut, pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini dapat mempengaruhi populasi ikan, migrasi ikan, dan pola penangkapan ikan
11. Kondisi Ekonomi Global, Fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan ketidakpastian politik dapat mempengaruhi harga ikan, permintaan pasar, dan investasi dalam industri perikanan
12. Tingginya Biaya Pengangkutan Ikan, Kenaikan harga bahan bakar minyak, biaya operasional armada kapal, infrastruktur transportasi yang kurang memadai, dan jarak tempuh yang jauh dari lokasi penangkapan ikan ke pasar konsumen

## 1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Logistik selama Triwulan II Tahun 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan II Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan II Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja selama Triwulan II Tahun 2024;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Logistik, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Logistik serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Logistik;

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Logistik Tahun 2025;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Logistik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Logistik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Logistik. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Logistik sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Logistik serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Logistik untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran**.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional, maka perlu disusun beberapa target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029. Penyusunan target capaian ini juga memperhatikan agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, sasaran strategis KKP yang didukung Ditjen PDSPKP, serta tujuan pembangunan PDSPKP tahun 2025-2029. Terkait agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, Ditjen PDSPKP mendukung agenda transformasi ekonomi dan agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu **“Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung tiga misi, yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan,
2. Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan, dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian misi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka langkah-langkah strategis pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan Direktorat Logistik adalah mengembangkan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

### **2.1.1 Sasaran Kegiatan**

Direktorat Logistik pada tahun 2025 mempunyai 3 sasaran kegiatan (SK) yaitu (1) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku; (2) Meningkatnya Kinerja Logistik Ikan Dalam Negeri; (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

### **2.1.2 Kebijakan**

Arah Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan KKP berbasis Ekonomi Biru yaitu (1) penambahan luas kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan terukur, (3) pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, (4) pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dalam rangka mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan Ditjen PDSPKP periode tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Dalam implementasi kebijakan dimaksud, strategi pembangunan yang berhubungan dengan Direktorat Logistik adalah Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yakni sistem manajemen rantai pasok ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Kebijakan dan strategi pembangunan dimaksud dilaksanakan dalam satu program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan didukung oleh kegiatan pokok, yang salah satunya adalah Kinerja Logistik Hasil Perikanan.

## **2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2025. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Berdasarkan dengan DIPA awal Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 02 Desember 2024 Direktorat Logistik mempunyai Pagu awal Rp.5.856.950.000,-. Dan berdasarkan tindaklanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dan DIPA Rev 1 Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 22 Februari 2025

Direktorat Logistik mendapatkan anggaran efektif setelah efisiensi sebesar Rp.682.613.000,-.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Logistik

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                              | TARGET |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.               | Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan                                                              | 1.                         | Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen)                          | 27,2   |
|                  |                                                                                                                     | 2.                         | Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Persen)   | 20     |
| 2.               | Meningkatnya Kinerja Logistik Ikan Dalam Negeri                                                                     | 3.                         | Kinerja Logistik Ikan (Indeks)                                                                                               | 72     |
|                  |                                                                                                                     | 4.                         | Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku (Persen)                                  | 20     |
|                  |                                                                                                                     | 5.                         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri (Persen)                                                      | 90     |
|                  |                                                                                                                     | 6.                         | Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik (Persen)                                                                    | 80     |
| 3.               | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | 7.                         | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen) | 95     |
|                  |                                                                                                                     | 8.                         | Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)                                                | 100    |
|                  |                                                                                                                     | 9.                         | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)                       | 81     |
|                  |                                                                                                                     | 10.                        | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)                                                      | 86     |
|                  |                                                                                                                     | 11.                        | Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)                                                        | 87     |

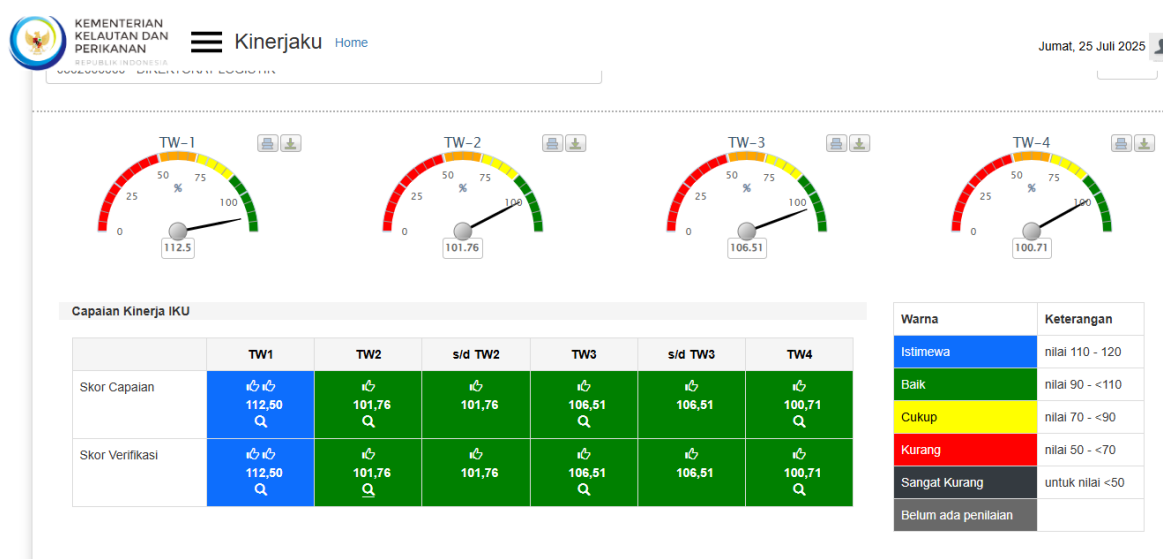
## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja

Direktorat Logistik tahun 2025 memiliki 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 4 IKK bersifat tahunan, 6 IKK bersifat triwulan dan 1 IKK bersifat semesteran.

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari Januari sampai dengan Juni 2025. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerjaku sampai dengan Triwulan II sebesar 107,62.



Gambar 2. Layar tangkap *dashboard* nilai capaian Triwulan II Direktorat Logistik pada aplikasi kinerjaku

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Logistik s.d. Triwulan II Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan II Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                          | Target     |            | Realisasi sd TW II 2025 | Persentase terhadap target (%) |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|------------|
|    |                                                                                                                     | Tahun 2025 | TW II 2025 |                         | Tahun 2025                     | TW II 2025 |
| 1. | Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan                          | 27,1       | 9,50       | 15,15                   | 55,70                          | 159,45     |
| 2. | Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan   | 20,0       | 8,0        | 8,0                     | 40,00                          | 100,00     |
| 3. | Kinerja Logistik Ikan                                                                                               | 72,0       | 72,0       | 72,53**                 | 100,74                         | 100,74     |
| 4. | Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku                                  | 20,0       | 10,0       | 11,70                   | 58,50                          | 117,00     |
| 5. | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri                                                      | 90,0       | 90,0       | 97,30**                 | 108,11                         | 108,11     |
| 6. | Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik                                                                    | 80,0       | -          | -                       | -                              | -          |
| 7. | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik | 95,0       | 95,0       | 100                     | 105,26                         | 105,26     |
| 8. | Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik                                                | 100,0      | -          | -                       | -                              | -          |

| No  | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                    | Target     |            | Realisasi sd TW II 2025 | Persentase terhadap target (%) |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|------------|
|     |                                                                                               | Tahun 2025 | TW II 2025 |                         | Tahun 2025                     | TW II 2025 |
| 9.  | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik | 81,0       | -          | -                       | -                              | -          |
| 10. | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik                               | 86,0       | -          | -                       | -                              | -          |
| 11. | Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik                                  | 87,0       | 82,0       | 84,65                   | 97,30                          | 103,23     |

*\*\*Prognosa*

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Logistik. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

#### 3.2.1. Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan

##### 3.2.1.1. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen)

Merupakan Peningkatan Persentase Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan dari periode sebelumnya ke periode yang sedang diukur. Ketertelusuran Produk Perikanan adalah kemampuan untuk melacak dan mendokumentasi produk perikanan dari awal hingga akhir. Mulai dari penangkapan hingga pemasaran. Tujuannya adalah menjamin penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, memberikan informasi terperinci tentang asal dan penanganan produk perikanan serta memastikan ketertelusuran rantai pasok dan produk perikanan secara elektronik.

Sistem ketertelusuran memerlukan metode yang tepat untuk menelusuri riwayat asal-usul suatu bahan pangan, proses produksi, pengemasan, distribusi/transportasi sampai kepada konsumen. Pelaksanaan implementasi STELINA juga dilakukan untuk monitoring realisasi dan distribusi produk hasil pemasukan hasil perikanan

Tabel 3. Target dan capaian IK 1

| Indikator Kinerja                                                                          | Target     |           |            |            | Realisasi  |           |            |               | % Realisasi Terhadap Target TW II | % Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025 | % Pertumbuhan Terhadap Realisasi |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                                                                            | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Tahun 2025 | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Sd TW II 2025 |                                   |                                            | TW I 2025                        | TW II 2024 |
| Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan | 9,5        | 4,1       | -          | 27,2       | 11,1       | 4,1       | -          | 15,15         | 116,3                             | 55,7                                       | 169,5                            | -          |

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir, target indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan pada triwulan II adalah 9,5 Persen dan target pada tahun 2025 adalah 27,2 Persen, Realisasi indikator ini pada triwulan II adalah 15,15 Persen atau setara 116,3% dari target triwulan II dan setara 55,7% terhadap target tahun 2025, Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 169,5% namun karena Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha 001 Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA) dengan pagu awal sebesar Rp.450.000.000,- dan pagu efisiensi Rp.103.944.400,-. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp18.886.796,- atau sebesar 4,20% terhadap pagu awal dan 18,17% terhadap pagu setelah efisiensi.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

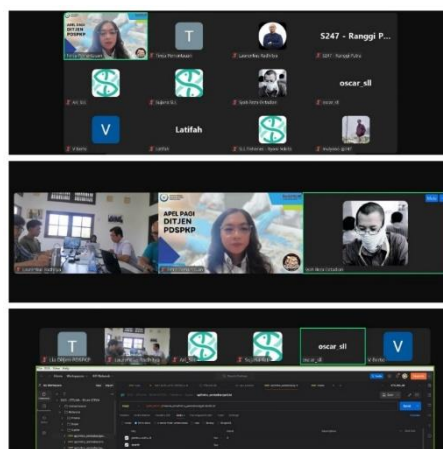
#### 1. Pembahasan Teknis STELINA dan *TraceTales*

Dilaksanakan pada tanggal 14 April 2025, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemantauan, dengan peserta rapat Tim Teknis Solusi 247, Tim Teknis *TraceTales* dan Penanggungjawab dan Pelaksana Lingkup Tim Kerja

Pemantauan. Pada kegiatan pembahasan teknis STELINA *Trace Tales* disepakati hal-hal sebagai berikut :

- Bidang wajib dan opsional untuk transaksi pembelian
- Pengambilan data pemasok untuk kapal di bawah 10 GT
- Memperjelas hubungan antara ID kapal dan fungsi pelaporan
- Peninjauan dan verifikasi data induk spesies ikan untuk konsistensi nama ikan dan nama latin
- Memperbarui API untuk meningkatkan fungsi pencarian nama spesies ikan
- Menerapkan validasi untuk kuantitas penjualan terhadap hasil pemrosesan
- Memperbaiki integrasi antara ID pemrosesan dan validasi data penjualan
- Penyempurnaan integrasi data penjualan, termasuk validasi ID
- Melakukan migrasi data dari stelina versi 1 ke versi 2
- Menambahkan bidang tipe mitra untuk dokumentasi API pemasok
- Memperbarui data mitra penjualan
- Menghapus bidang yang tidak perlu pada bagian belakang
- Menyertakan struktur data lengkap untuk transaksi penjualan
- Menambahkan informasi referensi jenis kemasan dan klarifikasi persyaratan merek kemasan dalam dokumentasi
- Menerapkan fitur merek kemasan dalam modul penjualan
- Menambahkan kapal penangkap ikan kecil dengan nomor BKP ke sistem daftar kapal
- Memeriksa dan memberikan sumber data utama untuk pendaftaran kapal
- Menambahkan penjelasan bagaimana ID aktor bisnis diperoleh dari sesi otentikasi/login

### Dokumentasi

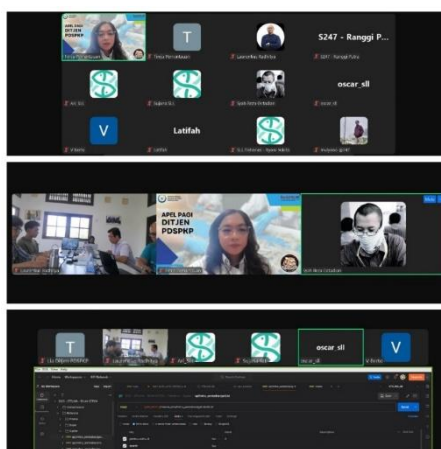


Gambar 1. Pembahasan Teknis STELINA dan *TraceTales*

## 2. Pertemuan **KICK-OFF EVENT STELINA GDST PROJECT**

Pertemuan **KICK-OFF EVENT STELINA GDST PROJECT** yang didukung bersama AP2HI (Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia). dilaksanakan secara online pada tanggal 20 Mei 2025 dibuka oleh Sesditjen PDSPKP dan dipimpin oleh Direktur Logistik, Ketua AP2HI dan Tim, Huw Thomas Executive Director GDST, Katimja Pemantauan, Katimja Kerjasama dan Humas, perwakilan lintas eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP, Biro HKLN, Pusdatin, dan Timja Pemantauan. Pada kegiatan ini membahas *concept notes* untuk pelaksanaan kegiatan *kick off* dimulainya proses pemenuhan STELINA versi baru sebagai sistem yang akan kompatibel dengan standar internasional GDST (*Global Dialogue on Seafood Traceability*), serta menjajaki dukungan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan. STELINA akan menjadi platform telusur resmi nasional yang harus mampu mengadopsi standar internasional, terutama GDST. Sistem ini akan mendukung ketelusuran dan transparansi produk Indonesia di pasar global. Koordinasi Internal KKP untuk memperkuat sinergi antar-unit di dalam KKP, khususnya Pusdatin dan BH-KLN, agar sistem ini dapat operasional secara menyeluruh serta penting untuk menyusun roadmap implementasi sistem agar dapat dilaporkan sebagai proyek strategis.

### Dokumentasi



Gambar 2. Pertemuan KICK-OFF EVENT STELINA GDST PROJECT

## 3. **Day Zero Kick-off Event STELINA**

*Day Zero Kick-off Event STELINA* Pada *Shrimp Summit* Bali dilaksanakan tanggal 22 Juni 2025 di Bali berkolaborasi dengan *Global Dialogue on Seafood Traceability* (GDST) dengan tujuan memperkuat interoperabilitas sistem ketertelusuran nasional dengan standar internasional GDST dalam mewujudkan sistem pelacakan hulu-hilir ikan secara digital di Indonesia. Penerapan dan adopsi standar GDST pada

STELINA merupakan tindak lanjut amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional, yang bertujuan untuk memastikan kompatibilitas dan kredibilitas sistem ketertelusuran ikan nasional dan meningkatkan efisiensi logistik pada rantai pasok. Beberapa manfaat strategis yang diperoleh untuk KKP dan industri perikanan Indonesia, antara lain:

- Mewujudkan integrasi sistem ketertelusuran secara sistemik, akurat, terbuka dan efisien sehingga data dari berbagai platform (swasta dan publik) dapat saling terhubung.
- Meningkatkan kepercayaan (*trust*) pasar global, khususnya negara-negara yang mensyaratkan pelacakan berbasis digital dan auditabilitas data (AS, UE, Jepang).
- Memperkuat sistem pelaporan untuk memastikan produk bebas IUU Fishing dan mematuhi prinsip keberlanjutan.
- Memfasilitasi pemasaran hasil perikanan Indonesia di tingkat internasional dengan mengurangi risiko hambatan teknis (non-tariff barrier) dengan kesesuaian traceability standar global.
- Mendukung efisiensi operasional logistik ikan dengan pengurangan beban verifikasi manual dan audit di setiap titik rantai pasok.

Hasil diskusi panel dalam *Kick-off Event* digunakan untuk memperkuat STELINA dalam menjembatani digitalisasi industri perikanan dan memberikan solusi interoperabilitas yang kompatibel.

#### Dokumentasi



Gambar 3. Day Zero Kick-off Event STELINA

#### 4. Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)

Dilaksanakan secara daring pada tanggal 20 Mei 2025, dibuka oleh Direktur Logistik, dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat IV KKP, dan 763 pelaku usaha Kelautan dan Perikanan. Pada kegiatan ini disampaikan materi mengenai penjelasan umum mengenai STELINA sebagai sistem digital ketertelusuran rantai pasok produk perikanan melalui dasar hukum Permen KP No.32 Tahun 2024.

Manfaat keberadaan STELINA adalah sebagai legalitas produk, transparansi rantai pasok serta pemenuhan persyaratan pasar ekspor untuk penguatan daya saing.

Pada kesempatan ini dibahas terkait teknis dan kendala pada aplikasi STELINA seperti kekhawatiran pelaku usaha mengenai pajak. Hal ini dikarenakan beberapa data penjualan yang dikhawatirkan berdampak pada pengenaan tarif pajak, dan saat ini STELINA belum terhubung ke Direktorat Jenderal Pajak. Namun sesuai dengan regulasi yang ada, pelaporan tetap menjadi kewajiban pelaku usaha. Para Pelaku Usaha mengharapkan agar STELINA dapat terkoneksi dengan aplikasi pemerintah lainnya yang terkait dengan pendataan usaha perikanan.

Direktorat Logistik akan melakukan pendampingan lebih lanjut secara berkala kepada para pelaku usaha KP, agar dapat melakukan penginputan data pada STELINA, sehingga pelaku usaha tidak menemui kesulitan dalam proses penginputan data. serta akan melakukan koordinasi dengan pengembang aplikasi STELINA untuk menyelesaikan kendala-kendala teknis terkait penginputan data STELINA.

##### Dokumentasi



Gambar 4. Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)

## 5. Sosialisasi Sistem Resi Gudang Komoditas Udang

Dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025. Acara dibuka oleh Direktur Logistik, dan dihadiri oleh perwakilan eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP, perwakilan DKP Provinsi Sumatera Utara, DKP Provinsi DKI Jakarta, DKP Provinsi Jawa Tengah, DKP Provinsi Jawa Timur, DKP Provinsi Bali, DKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, DKP Provinsi Kalimantan Utara, DKP Provinsi Sulawesi Selatan, DKP Provinsi Sumatera Selatan, DKP Provinsi Jawa Barat, 32 eksportir dan pengolah udang, 4 UPT Pengujian Mutu Daerah dengan total jumlah peserta 125 orang.

Pada kegiatan ini disampaikan materi terkait peluang penerapan SRG pada komoditas udang ekspor dan mekanismenya serta syarat-syarat pengelolaan SRG melalui dukungan pembiayaan yang disediakan bank dan lembaga keuangan non-bank. Pelaku usaha harus memiliki legalitas usaha sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dan tanda daftar gudang (TDG), Sesuai peraturan menteri perdagangan No 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. dimana TDG jika gudang menyatu dengan fasilitas pengolahan maka dapat digantikan dengan izin operasional pengolahan yang mencantumkan fungsi penyimpanan. Tidak terdapat batas nominal pembiayaan baku. Besar pembiayaan tergantung kapasitas gudang dan kualitas barang. Pemilik barang harus bebas kredit bermasalah. Pengawasan rutin wajib dilakukan untuk memastikan barang ada dan layak, dengan pemisahan barang SRG agar tidak tercampur dengan barang lain.

### Dokumentasi



Gambar 5. Sosialisasi Sistem Resi Gudang Komoditas Udang

### 3.2.1.2. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Persen)

Merupakan Kegiatan pembinaan kepada UMKM dan pelaku usaha distribusi ikan untuk penerapan cara distribusi ikan yang baik dalam rangka

perolehan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI). UMKM adalah semua pelaku usaha distribusi ikan yang terdiri dari pelaku usaha pengadaan ikan, sortasi dan grading ikan, penyimpanan ikan, dan/atau transportasi ikan. Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha distribusi ikan tentang Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) untuk mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan selama proses distribusi ikan.

Tabel 4. Target dan capaian IK 2

| Indikator Kinerja                                                                                                 | Target     |           |            |            | Realisasi  |           |            |               | % Realisasi Terhadap Target TW II | % Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025 | % Pertumbuhan Terhadap Realisasi |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                                                                                                   | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Tahun 2025 | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Sd TW II 2025 |                                   |                                            | TW I 2025                        | TW II 2024 |
| Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | 8,0        | 3,0       | -          | 20,0       | 8,0        | 3,0       | -          | 8,0           | 100,0                             | 40,0                                       | 166,7                            | -          |

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir, target indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada triwulan II adalah 8 Persen dan target pada tahun 2025 adalah 20 Persen, Realisasi indikator ini pada triwulan II adalah 8 Persen atau setara 100% dari target triwulan II dan setara 40% terhadap target tahun 2025, Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 166,7% namun karena Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II. untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 001 Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka penguatan sistem logistic dengan pagu awal sebesar Rp.481.950.000,- dan pagu efisiensi Rp. 86.495.000,-. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 59.661.500,- atau sebesar 12,38% terhadap pagu awal dan 68,98% terhadap pagu setelah efisiensi.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

**1. Sosialisasi Pembinaan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) dan Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan (CDIB)**

Dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi dan dihadiri oleh Perwakilan UPT BPPMHKP Prov. Kalimantan Selatan; Perwakilan DKP Prov. Kalimantan Selatan; Penyuluh Perikanan DKP Prov. Kalimantan Selatan dan Pelaku Usaha Perikanan Prov. Kalimantan Selatan, Perwakilan DKP Prov. Lampung. Peserta bimtek pada kegiatan ini adalah supplier yang memasok bahan baku ke UPI yang akan ekspor ke UE (PT. Jaring Aruna Dagang Indonesia Cabang Kotabaru, Rusdiana, Norahman, Hilma Amalia, UD Optimis).

Pelaku usaha yang menerapkan CDIB adalah Pelaku Usaha Pengadaan, sortasi & grading dan penyimpanan ikan yang tidak wterintegrasi dengan UPI, serta Pelaku Jasa Logistik (Pengangkutan ikan segar, beku, hidup dan kering) kecuali pengangkutan ikan menggunakan Kapal Pengangkut Ikan. Supplier (non pengolahan) merupakan pelaku usaha Pengadaan, sortasi & grading ikan yang tidak terintegrasi dengan kegiatan pengolahan.

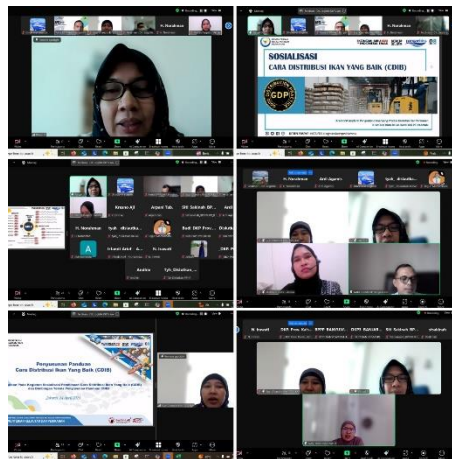
Kegiatan pengadaan meliputi penanganan ikan selama proses pengadaan misalnya pemberian es untuk mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan, termasuk pula kegiatan sortasi dan grading (proses pemisahan dan pengelompokan ikan berdasarkan ukuran, jenis, dan kualitas, atau tujuan lainnya atau kegiatan yang dikecualikan dari kegiatan pengolahan).

Panduan CDIB dibagi atas 2 format panduan yaitu Panduan CDIB untuk Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang tidak melakukan pengembangan HACCP dan Panduan CDIB untuk Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang melakukan pengembangan HACCP. Panduan yang disusun oleh Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang tidak melakukan pengembangan HACCP dibuat secara simpel/ sederhana dengan tetap menyesuaikan standar yang tertuang dalam Permen KP no 9 thn 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan dan mengacu pada kuesioner penilaian. Pelaku usaha Distribusi ikan yang melakukan ekspor atau memasok bahan baku UPI yang menerapkan HACCP, maka Panduan CDIB ini disesuaikan dengan standar penerapan CDIB yang melakukan pengembangan HACCP.

Saat ini SKP masih menjadi persyaratan yg digunakan sebagai PBUMKU untuk semua pelaku usaha penanganan dan/atau pengolahan sampai revisi PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diundangkan sehingga SPDI masih bersifat

sukarela (valuntery) bagi pelaku usaha yang tidak melakukan pengolahan, seperti: Pengadaan, sortasi & grading dan penyimpanan ikan serta pelaku jasa logistik. SPDI sebagai alternatif yang lebih mudah dalam pemenuhan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dibanding SKP mengingat pelaku usaha distribusi ikan tidak melakukan pengolahan sehingga dianggap tidak memberatkan dalam pemenuhan persyaratannya. SPDI berlaku selama 4 tahun dan setiap tahun akan dilakukan *surveillance* oleh badan mutu untuk pengecekan konsistensi penerapan CDIB tanpa melalui pengajuan permohonan dari pelaku usaha. Pelaku usaha berharap dengan SPDI bisa langsung dapat mengajukan HACCP untuk melakukan ekspor seperti saat ini SKP sbg persyaratan dlm perolehan HACCP bagi UPI yg akan ekspor. KKP masih berkoordinasi terkait hal tersebut.

#### Dokumentasi



Gambar 6. Sosialisasi Pembinaan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) dan Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan (CDIB)

## 2. Sosialisasi Sertifikasi SPDI dan Pendampingan Penyusunan Panduan Mutu dan SKP Bagi Supplier Yang Memasok Bahan Baku ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa

Dilaksanakan di Jakarta Utara tanggal 7 Mei 2025 Kegiatan dipimpin oleh Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen BPPMHKP, dihadiri oleh Kepala Balai KIPM Jakarta II, Perwakilan Pusat Mutu Produksi Primer, Perwakilan Pusat Manajemen Mutu, perwakilan dari Ditjen PDSPKP (Direktorat Logistik dan Direktorat Pengolahan), Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Daerah Khusus Jakarta, Perwakilan dari Unit Pengolahan Ikan dan Supplier dengan tujuan ekspor ke Uni Eropa (UE).

Tujuan Kegiatan ini adalah melakukan Sosialisasi Sertifikasi SPDI dan Pendampingan Penyusunan Panduan Mutu CDIB dan SKP bagi Supplier yang memasok Bahan Baku ke Unit Pengolahan Ikan dengan tujuan Ekspor ke Uni Eropa.

Latar Belakang kegiatan ini BBPMHKP mewajibkan supplier (non pengolahan) untuk memiliki SPDI sehingga perlu dilakukan pembinaan

penerapan CDIB, salah satunya melalui kegiatan bimtek ini. Menindaklanjuti *Plan of Action* (PoA) dan rekomendasi dari hasil Audit DG Sante – UE serta merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi dengan BPPMHKP untuk penerapan CDIB oleh supplier yang akan memasok bahan baku ke UPI yang akan ekspor ke UE. Dimana UE mensyaratkan pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada setiap rantai pasok. Pentingnya pemenuhan standar mutu hasil perikanan oleh KKP sebagai Otoritas Kompeten SJMKHP guna pemenuhan persyaratan internasional dan keberterimaan hasil perikanan di pasar internasional.

#### Dokumentasi



Gambar 7. Sosialisasi Sertifikasi SPDI dan Pendampingan Penyusunan Panduan Mutu dan SKP Bagi Supplier Yang Memasok Bahan Baku ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa

### 3. Simulasi Penilaian Penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)

Kegiatan dilaksanakan tanggal 9 Mei 2025 di Wisma Glacillaria, dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan, sebagai upaya mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan selama Distribusi Ikan dan menindaklanjuti surat permohonan penilaian penerapan CDIB dari CV. Nuraeni dan UD. Optimis tanggal 29 April 2025. Pada kegiatan ini dilakukan pengamatan penerapan CDIB secara online (*Remote Assesment*) menggunakan video unit usaha distribusi ikan (supplier) yg telah dikirimkan oleh CV. Nuraeni Kab. Barru Provinsi Sulawesi Selatan, UD. Optimis di Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung, serta unit usaha distribusi ikan dari Provinsi Kalimantan Selatan (Supplier Rusdiana, Nurrohman dan Hilma). Serta simulasi penilaian penerapan CDIB menggunakan form penilaian sesuai dengan permen KP no. 9 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan.

Kegiatan ini membahas tentang penerapan standar higienis masing-masing pelaku usaha yang berbeda-beda dalam penerapannya tergantung dari tingkat pemahaman dan komitmen dari pelaku usaha dalam mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditangani, Penilaian penerapan CDIB sebaiknya dilaksanakan pada saat ada proses penanganan ikan di unit usaha agar hasil penilaian lebih akurat. Apabila terdapat proses penanganan yg memang tidak dilakukan oleh pelaku usaha (misalnya pelaku usaha tidak melakukan sortir) namun menjadi salah satu item penilaian dalam penerapan standar CDIB, maka item tersebut tidak perlu dinilai dan penghitungan prosentase, sehingga diperoleh nilai/prosentase yang sesuai serta menambahkan tabel keterangan pada *checklist* penilaian penerapan CDIB agar saran perbaikan dapat disampaikan kepada pelaku usaha sebagai catatan dalam upaya meningkatkan penerapan CDIB selanjutnya.

#### Dokumentasi



Gambar 8. Simulasi Penilaian Penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)

#### 4. Sosialisasi Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) serta Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan CDIB

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Timja Pengadaan dan Distribusi Direktorat Logistik pada tanggal 20 Mei 2025, dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan dihadiri oleh 45 peserta yang terdiri dari perwakilan Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen, BPPMHKP, UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Jawa Timur (Surabaya I) dan Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dan Pelaku Usaha Perikanan (Pengadaan Ikan/Supplier) yang berada di Kab./Kota Surabaya, Banyuwangi dan Sragen.

Pada kegiatan ini dibahas antara lain Pembuatan NIB oleh Pelaku Usaha yang dapat dilakukan secara mandiri melalui OSS.

Pelaku usaha dapat memilih KBLI melalui OSS disesuaikan dengan kegiatan usahanya. Aktivasi KBLI pada OSS untuk pelaku usaha skala mikro kecil tidak dipungut biaya. Sehingga supplier dengan skala usaha mikro kecil dapat mengurangi, menambahkan dan mengganti untuk menyesuaikan KBLI nya melalui OSS dengan mudah. Saat ini SPDI belum bisa diterbitkan oleh KKP menunggu revisi PP 5 tahun 2024. Namun KKP berupaya untuk mengisi kekosongan regulasi dengan mengeluarkan surat keterangan penerapan HACCP di supplier. Pembinaan penerapan CDIB akan tetap dilaksanakan untuk persiapan diundangkan revisi PP 5 tahun 2021 sebagai upaya dalam mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan distribusi ikan.

#### Dokumentasi



Gambar 9. Sosialisasi Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) serta Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan CDIB

### 3.2.2. Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan

#### 3.2.2.1. Kinerja Logistik Ikan (Indeks)

Logistik adalah sistem tata kelola arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (*procurement*), penyimpanan (*storage*), transportasi (*transportation*), dan pelayanan (*delivery services*) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, mulai dari titik asal (*point of origin*) sampai dengan titik tujuan (*point of destination*) secara efektif dan efisien. Komponen penting dalam logistik dibedakan menjadi : (a) pengelolaan barang (*material management*) dan (b) distribusi.

Koridor Logistik Hasil Perikanan adalah mata rantai logistik yang berperan dalam menggerakkan produk kelautan dan perikanan dari titik asal (*point of origin*) ke titik tujuan (*point of destination*) yang meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi dan jaringan keuangan.

Koridor logistik hasil perikanan yang terkelola adalah terbentuknya sistem rantai pasok logistik ikan dari hulu ke hilir yang didukung oleh adanya data pemetaan dan data analisa kebutuhan, adanya sarana prasarana dalam rangka mendukung pengadaan dan penyimpanan logistik perikanan, adanya sistem telusur dan distribusi untuk mendukung konektivitas rantai pasok, serta adanya penataan rantai pasok pada koridor. Target indikator tahun 2025 adalah 8 (Delapan) koridor logistik yang terkelola. Jumlah koridor logistik hasil perikanan yang terkelola, yaitu:

- 1) Bitung – Surabaya/Jakarta,
- 2) Ambon - Surabaya/Jakarta,
- 3) Kendari - Surabaya/Jakarta,
- 4) Makassar - Surabaya/Jakarta,
- 5) Kupang - Surabaya/Jakarta,
- 6) Mimika - Surabaya/Jakarta,
- 7) Biak - Surabaya/Jakarta, dan
- 8) Medan - Jakarta)

Data dukung IKK ini berupa dokumen laporan kegiatan pada lingkungan Direktorat Logistik dalam koridor logistik. Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023.

Tabel 5. Target dan capaian IK 3

| Indikator Kinerja     | Target     |           |            |            | Realisasi  |           |            |               | % Realisasi Terhadap Target TW II | % Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025 | % Pertumbuhan Terhadap Realisasi |            |
|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                       | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Tahun 2025 | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Sd TW II 2025 |                                   |                                            | TW I 2025                        | TW II 2024 |
| Kinerja Logistik Ikan | 72,00      | 72,00     | 71,90      | 72,00      | 72,53      | 72,00     | 71,90      | 72,53         | 100,74                            | 100,74                                     | 0,7                              | 0,87       |

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir, target indikator Kinerja Logistik Ikan pada triwulan II adalah 72 Indeks dan sama dengan target pada tahun 2025, Realisasi indikator ini pada triwulan II adalah 72,53 Indeks atau setara 100,74% dari target triwulan II dan target tahun 2025, Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,7% dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ppada periode yang sama maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,87%.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. ntuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BMA Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP 001 Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP dengan pagu awal sebesar Rp.600.000.000,- pagu efisiensi Rp. 90.679.000,- . Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 83.393.905,- atau sebesar 13,90% terhadap pagu awal dan 91,97% terhadap pagu setelah efisiensi.

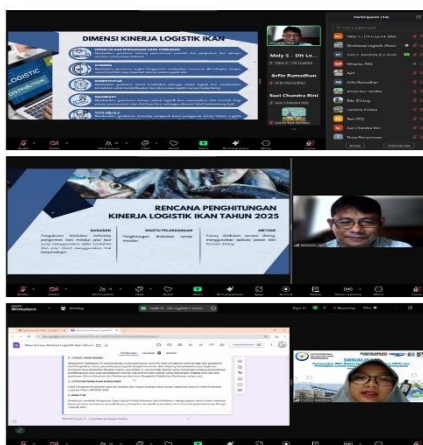
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

### **1. Pembahasan Kuesioner Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI)**

Dilaksanakan pada hari Jumat, 13 Juni 2025 secara daring melalui *zoom meeting*. Tujuan rapat ini yaitu untuk melakukan koordinasi internal lingkup Eselon 3 di lingkungan Direktorat Logistik dalam merumuskan bentuk tampilan kuesioner IKLI yang akan dilakukan secara online melalui aplikasi gform. Kegiatan dipimpin oleh Katimja Pemetaan dan dihadiri oleh perwakilan Timja Pemantauan, Timja TRP, Timja Sarana dan Prasarana, Timja Penyimpanan, dan pelaksana Timja Pemetaan. Kuesioner Pendataan IKLI baik untuk moda transportasi laut dan darat tahun 2025 dilakukan via googleform, tidak lagi menggunakan metode wawancara langsung. Telah dibuat kuesioner IKLI laut dan darat via googleform dengan memperingkas pertanyaan untuk mempermudah dan meningkatkan minat responden dalam mengisi kuesioner. Kuisisioner online melalui Platform Google Form merupakan sarana yang efektif dalam melakukan survei kepada banyak responden, karena form tersebut dapat diserbaluaskan secara cepat.

Jumlah pertanyaan disusun secara proporsional antar responden, terutama Pemerintah Daerah yang saat ini pertanyaannya lebih sedikit. Hal ini bertujuan agar masing – masing responden dapat memberikan gambaran yang representative untuk kinerja IKLI di Indonesia. Pada kegiatan ini juga pembahasan mengenai perlu dipertimbangkan pertanyaan terkait dengan biaya asuransi dan batasan biaya angkut. Serta pertanyaan yang memerlukan jawaban angka perlu dikunci agar hanya menerima input numerik sehingga memudahkan dalam analisis.

## Dokumentasi



Gambar 10. Pembahasan Kuesioner Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI)

## 2. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI)

Dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Juni 2025 melalui zoom meeting dihadiri oleh tim IKLI 7 koridor dan perwakilan DKP Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kabupaten Mimika, Kabupaten Biak Numfor, dan Tim Kerja Pemetaan Direktorat Logistik. Tujuan rapat ini adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) tahun 2025. Latar belakang diadakannya rapat ini adalah untuk melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) tahun 2025.

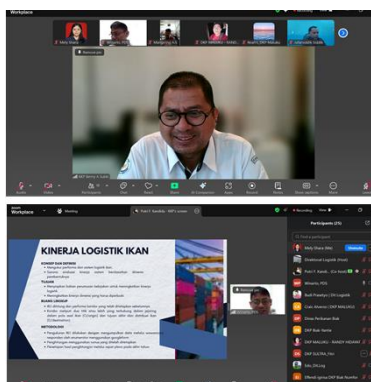
Dasar Hukum adanya penghitungan IKLI adalah Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian KP, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama para pakar telah menyusun metodologi pengukuran Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) secara ilmiah. Penyusunan IKLI ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, serta mengadaptasi konsep *Logistics*

*Performance Index* (LPI) yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Perhitungan IKLI menggunakan pendekatan 5 dimensi, yaitu Pengelolaan Pengadaan Hasil Perikanan, Efisiensi, Konektivitas, Manfaat, dan Tata Kelola. Kelima dimensi tersebut dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi dan performa logistik perikanan nasional, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan perbaikan sistem logistik ikan di Indonesia. Sebagai bagian dari proses pengukuran IKLI tahun 2025, pengumpulan data akan dilaksanakan melalui survei daring menggunakan platform Google Form. Hasil penghitungan IKLI akan digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja logistik ikan berdasarkan dimensi pembentuknya, serta menjadi referensi utama dalam penentuan arah kebijakan penguatan sistem logistik perikanan nasional ke depan. Selain survei untuk moda transportasi laut, pada tahun 2025 juga akan dilakukan survei IKLI untuk transportasi darat, khususnya pada koridor Medan – Jakarta. Perbedaan utama dari kedua survei terletak pada dimensi efisiensi yang disesuaikan dengan karakteristik moda transportasi masing-masing.

Dalam pelaksanaan pengukuran IKLI untuk WPPNRI 717, selain Pelabuhan Biak terdapat masukan untuk menambahkan koridor logistik Manokwari. Hal ini didasarkan pada tingginya aktivitas logistik perikanan, khususnya kegiatan bongkar muat kapal perikanan di Pelabuhan Fasharkan Manokwari, dimana pada periode Mei hingga Juni 2025, Pelabuhan Biak telah mencatat distribusi sebanyak 50 kontainer berukuran 20 feet yang dikirim ke Surabaya. Penambahan koridor Manokwari diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap rantai pasok perikanan di kawasan WPPNRI 717.

### Dokumentasi



Gambar 11. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI)

### 3. Pelaksanaan Kegiatan Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI)

Pelaksanaan penghitungan indeks kinerja logistik ikan triwulan 2 tahun 2025 dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi google form pada tanggal 24 Juni sampai dengan 03 Juli 2025. Kuesioner disebar kepada para responden dengan bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kab/Kota tim IKLI.

Berdasarkan survey penghitungan IKLI dari 8 koridor didapatkan jumlah responden sebanyak 83 responden yang terdiri dari 12 Pemerintah Daerah yang menangani bidang Kelautan dan Perikanan, 11 Pemerintah Daerah yang menangani bidang perencanaan pembangunan, 44 pelaku usaha perikanan, dan 16 pelaku usaha jasa logistik.

Data hasil survey tersebut kemudian direkap dan dihitung menggunakan rumus IKLI gabungan  $= (0.3065 \times \text{Skor IKLI Darat}) + (0.6935 \times \text{skor IKLI Laut})$  sehingga didapatkan nilai IKLI tahun 2025 triwulan 2 sebesar 72,53.

#### 3.2.2.2. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku (Persen)

Merupakan kegiatan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan *Cold Storage* (SIP-CS) kepada pelaku usaha penyimpanan hasil perikanan. SIP-CS digunakan untuk memantau pergerakan ikan (masuk dan keluar) secara waktu nyata (real time). Pelaku usaha yang menerapkan SIP-CS adalah pelaku usaha yang telah melakukan registrasi sebagai pemilik gudang atau karyawan dan melakukan input data ke aplikasi SIP-CS secara berkala dengan nilai rerata okupansi  $>1\%$  ditahun berjalan (dapat memperhitungkan pola musim ikan).

Penerapan SIP-CS dapat memberikan manfaat dalam mengontrol kesesuaian jumlah stok, penelusuran selisih stok dan memudahkan dalam mengendalikan dan memantau stok.

Tabel 6. Target dan capaian IK 4

| Indikator Kinerja                                                                  | Target     |           |            |            | Realisasi  |           |            |               | % Realisasi Terhadap Target TW II | % Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025 | % Pertumbuhan Terhadap Realisasi |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                                                                    | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Tahun 2025 | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Sd TW II 2025 |                                   |                                            | TW I 2025                        | TW II 2024 |
| Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku | 10,0       | 5,0       | -          | 20,0       | 11,7       | 5,8       | -          | 11,7          | 117,0                             | 58,5                                       | 134,0                            | -          |

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir. Target indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku pada triwulan II adalah 10 Persen dan target pada tahun 2025 adalah 20 Persen, Realisasi indikator ini pada triwulan II adalah 11,7 Persen atau setara 117% dari target triwulan II dan setara 58,5% terhadap target tahun 2025, Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 134% namun karena Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu AEE 001.C Optimalisasi Pengelolaan Sarana Penyimpanan Dalam Rangka Mendukung Ketersediaan Hasil Perikanan dengan pagu efisiensi Rp. 119.344.000,-. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 84.378.668,- atau sebesar 70,70% terhadap pagu efektif.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

#### 1. Koordinasi akselerasi penerapan kelayakan penyimpanan pada Gudang Beku (*Cold Storage*) Bantuan Pemerintah

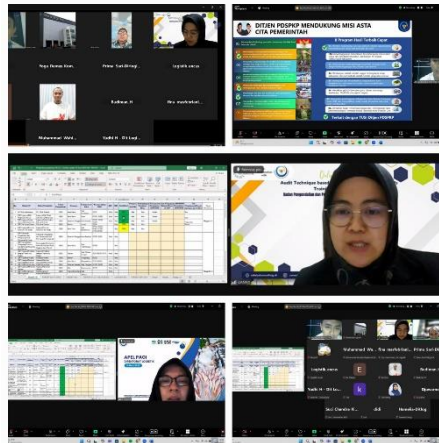
Dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 dibuka oleh Direktur Logistik, serta dihadiri oleh Direktorat Pengolahan, Pusat Mutu Pasca Panen dan Timja Lingkup Direktorat Logistik. Tujuan rapat adalah untuk

mengkonsolidasikan upaya percepatan sertifikasi terkait kelayakan penyimpanan pada gudang beku (cold storage) bantuan Pemerintah tahun 2020-2024.

Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP berkomitmen mendukung terwujudnya misi astas cita pemerintah terutama program swasembada pangan, hilirisasi dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Disamping itu, Dit. Logistik berkomitmen mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih dalam rangka mewujudkan misi Asta Cita ke-6, berkaitan dengan telah ditetapkannya Kepres 9/2025 tentang Satgas Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih, dimana Men KP menjadi wakil ketua Satgas. Mempertimbangkan hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan gudang beku (Cold Storage) bantuan pemerintah, salah satu upaya optimalisasi yang dilakukan adalah akselerasi penerapan kelayakan penyimpanan pada Gudang Beku (Cold Storage) Bantuan Pemerintah, yang pada akhirnya dapat dibuktikan dengan sertifikasi kelayakan gudang beku (Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI).

Pada periode 2020-2024, Direktorat Logistik, Ditjen PDSPKP telah memfasilitasi penyediaan Gudang beku sebanyak 51 unit yang tersebar di 49 kabupaten/kota (44 Unit beroperasi dan 7 Unit dalam proses persiapan operasional). Dari total 44 unit yang telah beroperasi, masih terdapat 21 unit *cold storage* yang belum memiliki sertifikat terkait kelayakan penyimpanan (SKP/ SPDI). Sertifikasi untuk kelayakan penyimpanan pada gudang beku bantuan Ditjen PDSPKP diarahkan melalui mekanisme Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), mengingat PP No. 5 tahun 2021 dan Permen KP 10 tahun 2021 saat ini masih berlaku. Untuk pelaksanaan pembinaan, verifikasi dan pendampingan penerapan kelayakan penyimpanan pada gudang beku bantuan pemerintah dapat dilakukan menggunakan mekanisme *remote assessment* serta perlu melibatkan Dinas KP Prov/Kab/Kota (Pembina Mutu Daerah).

## Dokumentasi



Gambar 12. Koordinasi akselerasi penerapan kelayakan penyimpanan pada Gudang Beku (Cold Storage) Bantuan Pemerintah

## 2. Monitoring implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Cold Storage (SIP-CS) dan pemantauan penerapan kelayakan gudang beku di Karawang

Dilaksanakan di kabupaten Karawang pada tanggal 30 Mei 2025 dengan lokasi monitoring yaitu di Poklahsar Putra Barokah, dan Kop. Produsen Putri Sri Rahayu , kegiatan ini bertujuan untuk Memantau implementasi SIP-CS bagi pengelola gudang beku BP, Memantau penerapan kelayakan penyimpanan pada gudang beku BP, dan Mengetahui kondisi rantai pasok ikan dan harga ikan bahan baku pemindangan terkini.

Poklahsar Putra Barokah merupakan penerima bantuan gudang beku dengan kapasitas 10 ton tanpa ABF tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan penggunaan SIP-CS, Poklahsar Putra Barokah teridentifikasi tidak menyampaikan data stok ikan harian secara rutin. Oleh karena itu perlu dilakukan monitoring lapangan untuk mengetahui kendala dan permasalahan di lapangan. Berdasarkan hasil monitoring lapangan, terdapat kendala dan permasalahan terkait personil yang memahami aplikasi SIP-CS data stok ikan harian tidak dapat standby secara rutin. Sebagai solusi, perlu adanya tambahan personil yg memahami aplikasi SIP-CS sehingga bisa saling menggantikan. Dalam kesempatan monitoring lapangan ini juga dilakukan asistensi pembuatan akun baru dan input data stok ikan SIP-CS. Dalam penerapan kelayakan penyimpanan Poklahsar Putra Barokah pada dasarnya telah melaksanakan namun ada beberapa sanitasi yang lebih diperhatikan sehingga kualitas ikan yang disimpan tetap terjaga mutunya

Koperasi Produsen Putri Sri Rahayu merupakan penerima Bantuan Pemerintah gudang beku dengan kapasitas 20 ton tanpa ABF tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SIP-CS, koperasi produsen putri sri rahayu mendapatkan Sertifikat apresiasi atas dedikasi dan komitmen penyampaian data stok ikan melalui SIP-CS yg ditandatangani oleh Dirjen PDS. Dalam kesempatan kunjungan lapangan, telah dilakukan penyerahan secara simbolis sertifikat apresiasi tersebut kepada Pihak Koperasi. Sertifikat apresiasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pihak koperasi agar selalu konsisten dlm penyampaian data stok ikan harian.

#### Dokumentasi



Gambar 13. Monitoring implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Cold Storage (SIP-CS) dan pemantauan penerapan kelayakan gudang beku di Karawang

### **3. Monitoring Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Cold Storage (SIP-CS) dan Pemantauan Penerapan Kelayakan Gudang Beku Bantuan Pemerintah**

Dilaksanakan di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Mei 2025 dengan lokasi yaitu KUD Mina Fajar Sidik, Poklahsar Aroma Jaya dan Poklahsar Berkah Bersama.

KUD Mina Fajar Sidik beralamat di Desa Blanakan, sebagai penerima BP Tahun 2021, kapasitas CS 30 ton dan ABF 1 ton. Mempunyai Bidang Usaha pembekuan dan penyimpanan ikan. Harga proses pembekuan ikan Rp1.000 per/Kg, sedangkan penyimpanan ikan Rp500 per/Kg. koperasi telah menerapkan SIP-CS, namun belum menyampaikan data stok ikan secara rutin. Terdapat kendala di internal karyawan lupa password dan kurang memahami input data diaplikasi versi baru. Dalam hal ini perlu pendampingan pembuatan password baru serta penginputan data nama pemilik ikan, input data ikan masuk dan ikan keluar.

Poklahsar Aroma Jaya Beralamat di Desa Blanakan, sebagai penerima Bantuan Pemerintah tahun 2020, kapasitas *cold storage* 30 ton. Poklahsar Aroma Jaya telah menambah bangunan *cold storage* secara mandiri Tahun 2022 dengan kapasitas 50 ton pada lokasi yang sama, kemudian Tahun 2024 membangun lagi *cold storage* kapasitas 70 ton dilokasi UPI. Bidang usaha Poklahsar adalah sebagai pengolahan ikan asin/kering sekaligus sebagai penjual/pemasar. Dalam rangka Implementasi SIP-CS koperasi telah menerapkan SIP-CS, namun belum menyampaikan data stok ikan secara rutin. karena kurangnya tenaga admintrasi solusi yang akan dilakukan yaitu proses penginputan dilakukan 1 minggu sekali.

Poklahsar Berkah Bersama beralamat di Dusun Cibatu Hilir, Desa Pinangsari Kec. Ciasem Kabupaten Subang sebagai penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2024 cold storage kapasitas 10 Ton dan ABF 1 Ton. Memiliki bidang usaha pengolah dan pemasar ikan, komoditas utama : telur ikan manyung, cumi, scallop dll, berdiri sejak Tahun 2018. Dalam rangka Implementasi SIP-CS Poklahsar telah menerapkan aplikasi SIP-CS dan melaporkan data stok ikan secara rutin. Dalam hal ini akan dilakukan pendampingan sehingga koperasi dapat memaksimalkan dan melakukan input SIP-CS secara rutin berdasarkan data – data yang valid.

#### Dokumentasi



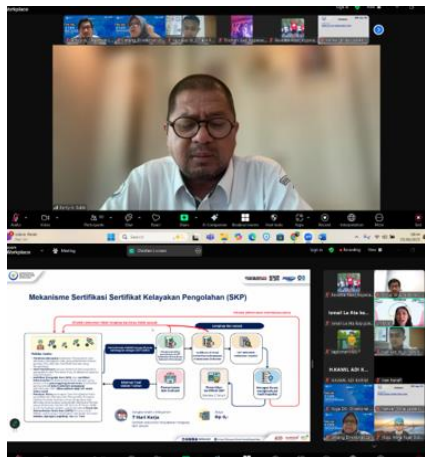
Gambar 14. Monitoring Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Cold Storage (SIP-CS) dan Pemantauan Penerapan Kelayakan Gudang Beku Bantuan Pemerintah

#### 4. Bimtek Penerapan Kelayakan Gudang Beku

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2025 dibuka oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pengolahan, perwakilan Pusat Mutu Pascapanen, pengelola Gudang Beku bantuan

pemerintah, dan Pembina Mutu Kab/Kota/Provinsi pendamping. Pengelola diharapkan dapat menerapkan kelayakan pengolahan di *Cold Storage* sehingga produk perikanan yang dikonsumsi Masyarakat terjamin mutu dan kualitasnya. Merupakan suatu kewajiban bagi pengelola *Cold Storage* untuk memiliki SKP, kesamaan visi misi dalam pembangunan *Cold Storage* dan menerapkan tata cara pengoperasian *Cold Storage* secara baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kegiatan saat ini merupakan rangkaian kegiatan pendampingan dan asistensi terkait sertifikasi kelayakan Gudang beku dalam hal ini SKP, dan akan dilakukan kegiatan berikutnya. Diharapkan pengelola memahami terkait hal-hal yang perlu diterapkan, kemudian akan dilanjutkan dengan asistensi kelengkapan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan SKP.

#### Dokumentasi



Gambar 15. Bimtek Penerapan Kelayakan Gudang Beku

### 5. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan *Cold Storage* (SIP-CS)

Dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025 melalui pemantauan aplikasi SIP-CS. Pengguna aplikasi SIP-CS per 31 Mei 2025 sebanyak 142 pengelola *cold storage* dengan mayoritas pengelola terdapat di Jawa Barat sebanyak 39 unit (4.471 ton) dengan okupansi 25,41% dan turn over 0,75, Jawa Timur sebanyak 10 unit (1.280 ton) dengan okupansi 15,70 % dan turn over 0,93 dan Sulawesi Tenggara sebanyak 8 unit (625 ton) dengan okupansi 35,26% dan turn over 0,17 sebagaimana dalam tabel terlampir. Pada Bulan Mei 2025 jumlah stok awal sebesar 2.892 ton, ikan masuk sebesar 1.343 ton, ikan keluar sebesar 2.162 ton sehingga jumlah stok akhir sebesar 2.054 ton dari total kapasitas *cold storage* 15.453 ton.

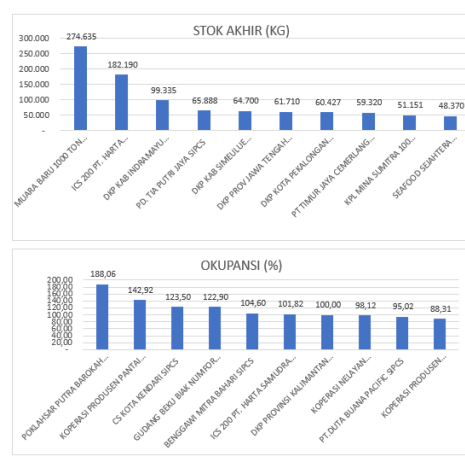
Stok 10 komoditas ikan terbesar yaitu tongkol 364,9 ton, gurita 236,2 ton, tuna 221,0 ton, layang 159,1 ton, cakalang 149, 5 ton, layur

111,9, bandeng 92,1 ton, cumi-cumi 71,74 ton, bawal 71,5 ton, dan makarel pasifik 65,72 ton Adapun rerata harga ikan per kilogram adalah tongkol Rp20.100, gurita Rp100.000, tuna Rp36.300, layang Rp23.300, cakalang Rp19.100, layur Rp31.500, bandeng Rp22.500, cumi-cumi Rp71.100, bawal Rp31.000, dan makarel pasifik Rp21.100. Rerata okupansi *cold storage* yang telah tercatat di aplikasi SIP-CS secara umum mencapai 28,53% dengan rerata *turn over* sebesar 0,26 (dihitung dengan membandingkan jumlah ikan keluar dengan kapasitas *cold storage*). Dari total 142 *cold storage* yang masuk kategori *cold storage* produksi sebanyak 101 dengan kapasitas 7.812 ton, *cold storage* distribusi sebanyak 39 unit dengan kapasitas 4.641 ton dan *cold storage* pengumpulan sebanyak 2 unit dengan kapasitas 3000 ton. Adapun *cold storage* produksi rerata okupansi sebesar 29,02% dengan siklus *turnover* 0,21, *cold storage* distribusi rerata okupansi sebesar 29,65% dengan siklus *turnover* 0,34 dan *cold storage* pengumpulan rerata okupansi sebesar 28,23% dengan siklus *turnover* 0,32.

Volume stok awal di Bulan Mei sebesar 2.892, 3 ton, mengalami penurunan sebesar 17 % jika dibandingkan dengan stok awal Bulan April. Adapun 5 gudang beku yang memiliki stok awal terbesar adalah Gudang Beku Muara Baru 1000 ton sebesar 879,6 ton, Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra 150,80 ton, Koperasi Santo Alvin Pratama 101,88 ton, DKP Kab. Trenggalek 100,78 ton, dan DKP Kota Pekalongan 96,79 ton. Volume stok akhir di Bulan Mei sebesar 2.054,9 ton, mengalami penurunan sebesar 29% jika dibandingkan dengan stok Bulan April. Adapun 5 gudang beku yang memiliki stok akhir terbesar adalah *cold storage* Muara Baru 1000 ton sebesar 274,6 ton, PT Harta Samudera 182,2 ton, Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra 99,3 ton, PD Tia Putri Jaya 65,9 ton, DKP Kab. Simeulue 64,7 ton, dan DKP Kota Pekalongan 60,4 ton.

Pengelola *cold storage* yang memiliki siklus *turnover* tertinggi adalah Poklahsar Cimesir 4,21 (Lebak), CV Sakana Indo Prima 3,12 (Kota Depok), DKP Kab. Trenggalek 2,94, Koperasi Produsen Pantai Ina Marina, 2,32, dan Koperasi Produsen Nelayan Sumber Jaya 2,23 (Mukomuko). Pada periode Mei 2025 jumlah stok awal 2.892,3 ton, jumlah ikan masuk sebesar 1.343 ton sedangkan ikan keluar sebesar 2.162,9 ton sehingga stok akhir sebesar 2.054,9 ton, hal ini menunjukkan ikan keluar lebih besar daripada ikan yang masuk sehingga jumlah stok ikan berkurang dikarenakan lebih banyak ikan yang keluar.

## Dokumentasi



Gambar 16. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Cold Storage (SIP-CS)

### 3.2.2.3. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri (Persen)

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur persentase pemenuhan kebutuhan ikan nasional dari ketersediaan pasokan produksi dari dalam negeri dan importasi hasil perikanan. Indikator ini bermanfaat untuk melihat kebutuhan dan ketersediaan bahan baku dari pasokan produksi dalam negeri dan pengambilan kebijakan pengendalian impor

Tabel 7. Target dan capaian IK 5

| Indikator Kinerja                                              | Target     |           |            |            | Realisasi  |           |            |               | % Realisasi Terhadap Target TW II | % Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025 | % Pertumbuhan Terhadap Realisasi |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                                                | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Tahun 2025 | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Sd TW II 2025 |                                   |                                            | TW I 2025                        | TW II 2024 |
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri | 90,0       | 90,0      | -          | 90,0       | 97,3       | 97,0      | -          | 97,3          | 108,1                             | 108,1                                      | 8,1                              | -          |

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir, target indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri pada triwulan II adalah 90 Persen dan target pada tahun 2025 adalah 90 Persen, Realisasi indikator ini pada triwulan II adalah 97,3 Persen atau setara 108,1% dari target triwulan II dan setara 108,1% terhadap target tahun 2025, Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 8,1% namun karena Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 001 Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok dan PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 001 Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas dengan pagu awal sebesar Rp.900.000.000,-. Pagu efisiensi sebesar Rp. 138.749.000,- Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp.18.136.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp.111.228.857,- atau sebesar 12,36% terhadap pagu awal dan 92,22% terhadap pagu efektif.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

#### **1. Penyusunan dashboard kinerja impor hasil perikanan melalui mekanisme Neraca Komoditas**

Kegiatan dilaksanakan secara daring pada tanggal 9 April 2025 dipimpin oleh Timja Tata Kelola Rantai Pasok. dihadiri oleh Ketua Timja Data dan Pelayanan Publik, Setditjen PDSPKP, Ketua Timja Pemetaan, Dit. Logistik, Penanggung Jawab lingkup Timja Tata Kelola Rantai Pasok, Pelaksana pada Timja Tata Kelola Rantai Pasok, Direktorat Logistik.

Kegiatan membahas pengembangan sistem dashboard untuk pelacakan data impor, dengan fokus pada dua komponen utama yaitu data realisasi dan data persetujuan. Tim meninjau proses pembersihan data dan membahas cara menangani pengenal unik untuk melacak perubahan dalam izin dan realisasi impor, dengan perhatian khusus untuk menghindari duplikasi data. Disepakati untuk memisahkan dashboard menjadi dua bagian utama yaitu satu untuk melacak realisasi dan satu lagi untuk persetujuan, dengan sistem yang perlu menangani data tahun berjalan (2025) dan data historis (2022-2024). Akan dibahas kriteria penilaian kinerja untuk perusahaan termasuk faktor-faktor seperti

kepemilikan fasilitas penyimpanan, aktivitas pemrosesan, dan afiliasi bisnis, yang memengaruhi alokasi kuota impor.

Pada kegiatan ini juga membahas pengembangan sistem dashboard untuk memantau realisasi dan persetujuan impor, terutama fokus pada produk perikanan. Direncanakan akan dibuat dua dasbord utama, satu untuk pemantauan impor waktu nyata yang diperbarui setiap hari dan yang kedua untuk pelacakan alokasi/persetujuan yang diperbarui secara berkala. Serta dibahas tantangan teknis seputar pembersihan data, pengenalan unik, dan integrasi dengan sistem jendela tunggal nasional (NSW). disepakati dalam rangka mencari solusi sementara semi-manual menggunakan data Excel dan bersamaan mengerjakan otomatisasi penuh melalui integrasi sistem. Pertimbangan utama meliputi keamanan data, pembatasan akses, parameter penilaian untuk persetujuan, dan memastikan keakuratan data di berbagai sistem.

#### Dokumentasi



Gambar 17. Penyusunan dashboard kinerja impor hasil perikanan melalui mekanisme Neraca Komoditas

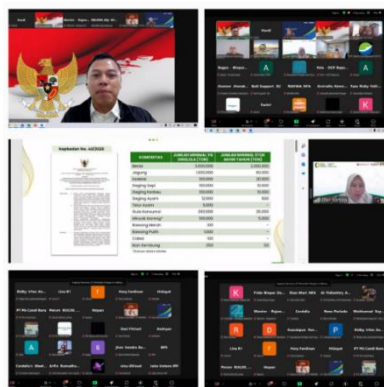
## 2. Menghadiri kegiatan BAPANAS, Koordinasi Teknis Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Progres Pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah

Koordinasi Teknis Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Progres Pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah, dilaksanakan secara daring pada tanggal 6 Mei 2025, Pimpinan Rapat: Asisten Deputy Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kemenko Bidang Pangan dan dihadiri Asdep Tata Niaga Perdagangan Pangan Dalam Negeri, Asdep Stabilisasi Harga Pangan, Asdep Logistik pangan Dalam Negeri, Asdep Perlindungan dan Bantuan Sosial Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, perwakilan Bappenas, Kementan, Kemendag, Dit.Logistik-KKP, ID Food, Perindo, Perum Bulog.

Dalam kegiatan ini dibahas realisasi penyelenggaraan CPP sampai April 2025, CPP adalah persediaan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah untuk kebutuhan konsumsi dan menghadapi keadaan darurat atau gejolak harga. CPP bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga, dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama saat terjadi krisis atau bencana. CPP dapat dimobilisasi dengan cepat untuk operasi pasar, distribusi bantuan pangan, atau intervensi pasokan dan harga. Dalam melaksanakan CPP Pemerintah dapat menugaskan Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan. Ikan termasuk ke dalam salah satu jenis komoditas pangan yang dikelola sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP, yang merupakan salah satu tugas dari Badan Pangan Nasional. Ikan yang menjadi komoditas CPP adalah jenis ikan kembung. Penetapan jumlah CPP ikan kembung pada tahun 2025 berdasarkan Kep Badan Pangan nomor 40 tahun 2025 adalah 250 ton dengan jumlah minimal stock akhir tahun 50 ton.

Terkait dengan Peta ketahanan dan kerawanan pangan Bapanas menyampaikan beberapa hal antara lain update data untuk penyusunan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Nasional tahun 2025. Dari 12 indikator yang diperlukan, baru 9 indikator yang sudah tersedia datanya dan masih menunggu data prevalensi balita stunting (menunggu publikasi dari Kemenko PMK dan Kemenkes) dan Data untuk indikator rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (khususnya data produksi jagung dan sagu). Data produksi padi, pisang, ubi kayu, dan ubi jalar sudah tersedia, sedangkan data jagung masih disiapkan oleh Kementerian Pertanian dan akan divalidasi oleh BPS.

#### Dokumentasi



Gambar 18. Menghadiri kegiatan BAPANAS, Koordinasi Teknis Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Progres Pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah

### 3. Koordinasi Aliran Data SINAS NK

Kegiatan dilaksanakan secara daring pada tanggal 8 Mei 2025, dipimpin oleh Katimja Tata Kelola Rantai Pasok dan dihadiri oleh perwakilan dari LNSW, Pusdatin KKP, Timja Tata Kelola Rantai Pasok dan Timja Pemantauan. Tujuan kegiatan ini untuk memastikan kesesuaian dan kelancaran aliran data dari SINAS NK ke inhouse NK KKP dan STELINA, mencakup aliran data realisasi impor, data jenis perusahaan, serta pengembangan aplikasi inhouse NK KKP terkait upload surat kuasa perusahaan secara otomatis.

Dalam kegiatan ini dibahas terkait pengaliran modul data realisasi impor dengan satuan yang seragam sebagaimana yang dilaporkan pelaku usaha (*self-declaration*) dapat dilakukan dalam waktu dekat. Teknis pengaliran data akan dikoordinasikan antara personil IT LNSW dan Pusdatin KKP.

Terkait penyesuaian data jenis perusahaan akan dilakukan penarikan pada tahun ini, sehingga untuk penyesuaian data tahun sebelumnya dapat berdasarkan referensi dengan menarik PIA pada GetDataRKI yang mana data tersebut sudah berhasil disesuaikan.

Untuk kelengkapan data realisasi impor yang dibutuhkan pada aplikasi STELINA seperti nama jasa logistik, harga produk, asal penangkapan atau asal lahan budidaya hal tersebut membutuhkan raw data PIB. Data tersebut belum di LNSW sehingga disarankan untuk melakukan koordinasi dengan Ditjen Bea dan Cukai sebagai pemilik data.

#### Dokumentasi



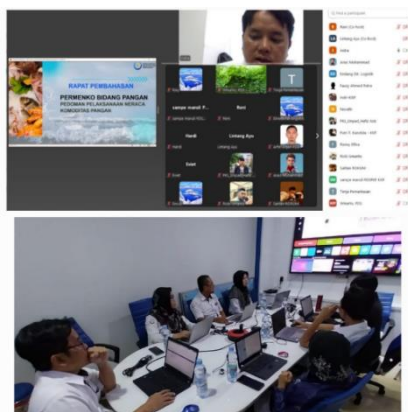
Gambar 19. Koordinasi Aliran Data SINAS NK

#### 4. Koordinasi Penyusunan Masukan terhadap Permenko Bidang Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan

Dilaksanakan di ruang rapat Direktorat Logistik, GMB III lantai 12 pada tanggal 24 Juni 2025 secara luring dan daring. Dipimpin oleh Katimja Tata Kelola Rantai Pasok dan dihadiri perwakilan Biro Hukum KKP, tim Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin KKP), perwakilan setditjen Perikanan Tangkap, Setditjen Perikanan Budidaya, Setditjen PDSPKP, Dit.Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan, Timja Hukum Setditjen PDSPKP, Timja Lingkup Dit.Logistik, Koordinator Hukum Direktorat, penanggung jawab Timja TRP serta pelaksana lingkup Timja TRP Direktorat Logistik. Bertujuan melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan.

Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa *kick-off* masih tahap awal, sehingga Kementerian dan Lembaga diberi kesempatan untuk memberikan masukan terkait penyusunan Peraturan Menko bidang pangan. Perlu dilakukan pencermatan terhadap Permen KP yang sudah ada tentang neraca komoditas sektor kelautan dan perikanan, untuk melihat apakah akan terdampak oleh peraturan baru ini. Secara umum proses bisnis seharusnya tidak ada perubahan signifikan, karena rujukan atasnya tetap sama yaitu Perpres NK. Namun, mungkin akan ada pendetailan dan perincian yang diminta melalui Sinas NK. Perlu dilakukan pencermatan antara Permenko 16/2022 dengan Permenko baru ini untuk keselarasan, terutama terkait implementasi di sistem Sinas NK. Selanjutnya sebagai tindak lanjut Biro Hukum KKP akan melakukan kompilasi masukan dari berbagai unit kerja KKP sebagai bahan pembahasan draft permenko pada pertemuan selanjutnya yang diselenggarakan kemenko pangan.

##### Dokumentasi



Gambar 20. Koordinasi Penyusunan Masukan terhadap Permenko Bidang Pangan tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan

### 3.2.2.4. Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik (Persen)

Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana yang diserahkan ke masyarakat adalah ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan sejauh mana sarana dan prasarana yang telah diserahkan kepada masyarakat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan fungsi, tujuan, atau peruntukannya. Pemanfaatan sarana dan prasarana pada IKK ini adalah pemanfaatan BP Tahun 2024 oleh koperasi/keompok usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang terdiri dari 10 unit Gudang Beku Portabel (GBP) dan 10 unit Kendaraan Berefrigerasi (KR). Monitoring pemanfaatan dan aktivitas pengelolaan BP berdasarkan form isian pemantauan berkala.

Optimalisasi pemanfaatan BP mengacu pada KEPDIRJEN PDSPKP Nomor 87 Tahun 2024 terdapat klausul terkait sanksi penerima BP sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Direktorat Logistik menekankan agar pemanfaatan BP dapat lebih optimal. Untuk itu, Direktorat Logistik akan memverifikasi ulang kemampuan pengelola serta melakukan pengalihan/penarikan aset jika tidak operasional sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok/koperasi lain yang membutuhkan.

Tabel 8. Target dan capaian IK 6

| Indikator Kinerja                                | Target     |           |            |            | Realisasi  |           |            |               | % Realisasi Terhadap Target TW II | % Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025 | % Pertumbuhan Terhadap Realisasi |            |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                                  | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Tahun 2025 | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Sd TW II 2025 |                                   |                                            | TW I 2025                        | TW II 2024 |
| Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik | -          | -         | -          | 80,0       | -          | -         | -          | -             | -                                 | -                                          | -                                | -          |

Berdasarkan tabel diatas, pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir. Indikator Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik pada tahun 2025 adalah sebesar 80 Persen pemanfaatan bantuan pemerintah dan indikator bersifat tahunan sehingga tidak ada realisasi pada triwulan II, Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II. untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QEG Bantuan Peralatan / Sarana 001 Sarana Penyimpanan Produk KP dengan pagu awal sebesar Rp.2.300.000.000,- pagu efisiensi sebesar Rp. 1.169.829.300,- Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp. 1.039.997.300,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 96.116.665,- atau sebesar 4,18% terhadap pagu awal dan 74,09% terhadap pagu efektif.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

#### **1. Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Refrigerasi dan Gudang Beku Portable**

Koordinasi atas Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel di Kab. Tambrau, Kab. Kep Aru, dan Kab. Kebumen pada Hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 secara daring melalui zoom meeting. dihadiri oleh perwakilan Inspektorat IV KKP, Perwakilan Timja BMN dan PBD PDSPKP, Perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Tambrau, dan Perwakilan Timja Lingkup Direktorat Logistik.

Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portable (GBP) Kab. Tambrau, GBP tersebut berkapasitas 10 ton dengan ABF 1 ton berlokasi di Kampung Bondek, Distrik Sausapor, Kab. Tambrau, Papua Barat Daya telah diserahkan oleh Ditjen PDSPKP kepada KUB Nusantara 1 sebagai Pengelola pada tanggal 29 Desember 2023, sempat operasional tetapi Penerima mengalami kekurangan modal sehingga tidak dapat beroperasi hingga saat ini. Sedang diupayakan pemindahan pengelolaan Gudang Beku Portabel yang semula KUB akan dijadikan Koperasi yg merupakan kumpulan beberapa KUB di wilayah sekitar. Kekurangan daya listrik di lokasi karena adanya penambahan Asset (pabrik es) di sekitar lokasi.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain Dinas Perikanan Kab. Tambrau akan berkoordinasi dengan PLN terkait ketersediaan daya listrik, penambahan gardu dan tiang listrik ke lokasi Gudang Beku Portabel. Dinas Perikanan Kab. Tambrau akan melaporkan setiap proses administrasi serta rencana bisnis Koperasi secara berkala kepada Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Direktorat Logistik serta akan melaporkan Dokumentasi video dan foto geotagging kondisi Gudang Beku Portabel

Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portable (GBP) Kab. Kep. Aru .GBP tersebut berkapasitas 10 ton dengan ABF 1 ton berlokasi di Siwalima, Kec. Pulaupulu Aru, Kab. Kepulauan Aru, Maluku telah

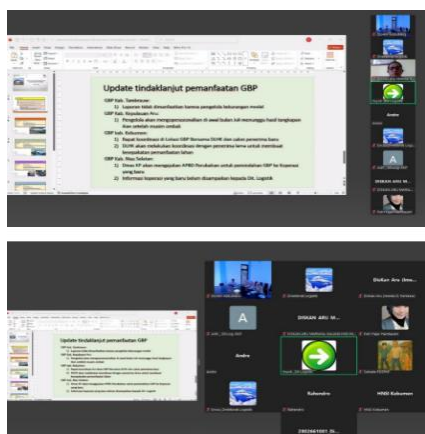
diserahkan oleh Ditjen PDSPKP kepada Koperasi Nelayan Aru Mina Jaya sebagai Pengelola pada tanggal 24 Oktober 2022, namun belum beroperasi karena kendala permodalan. Saat ini Gudang Beku Portable (GBP) Kab. Kep. Aru telah dimanfaatkan sesuai kesepakatan pada rapat sebelumnya dengan sumber listrik menggunakan genset, biaya penyambungan listrik baru dalam proses pengumpulan dana bersama anggota. Gudang Beku Portabel saat ini digunakan untuk menyimpan bahan baku ikan dengan keterisian sementara 300 kg. Beberapa kapal milik anggota koperasi belum mendarat, diharapkan tingkat keterisian Gudang Beku Portabel akan meningkat bila kapal sudah mendarat.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Aru diminta melaporkan dokumentasi video dan foto Geotagging pemanfaatan Gudang Beku Portable (GBP) secara berkala. Akan dilakukan pendampingan pelaporan pemanfaatan berkala dari penerima melalui aplikasi SIP CS. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Aru akan melakukan pembinaan terkait kerjasama Koperasi dengan Dapur MBG.

Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portable (GBP) Kab. Kebumen. Gudang Beku Portable (GBP) tersebut berkapasitas 10 ton dengan ABF 1 ton terletak di Logending, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, Jawa Tengah. Gudang Beku Portabel tersebut telah diserahkan oleh Ditjen PDSPKP kepada Pohlhasar Perintis Karya Mina sebagai Pengelola pada tanggal 29 September 2022. Saat ini terdapat, kendala operasional, dimana GBP digunakan tidak sesuai peruntukannya. Penerima lama sudah tidak mengoperasikan dan telah menyerahkan Gudang Beku Portable (GBP) kepada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen, Calon pengelola baru siap mengoperasikan Gudang Beku Portable (GBP) namun perlu kesepakatan resmi untuk pengelolaan Gudang Beku Portable (GBP) di atas lahan penerima lama.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain, Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen akan melaporkan upaya dalam menyelesaikan penyusunan kesepakatan resmi secara periodik. Penerima baru akan mencari alternatif lahan baru untuk penempatan Gudang Beku Portable (GBP). Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen diminta melaporkan Dokumentasi video dan foto geotagging kondisi GBP.

## Dokumentasi



Gambar 21. Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Refrigerasi dan Gudang Beku Portable

### 3.2.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

#### 3.2.3.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Logistik. Indikator ini ditargetkan sebesar 95. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Tabel 9. Target dan capaian IK 7

| Indikator Kinerja                                                                                                   | Target     |           |            |            | Realisasi  |           |            |               | % Realisasi Terhadap Target TW II | % Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025 | % Pertumbuhan Terhadap Realisasi |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                                                                                                     | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Tahun 2025 | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Sd TW II 2025 |                                   |                                            | TW I 2025                        | TW II 2024 |
| Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik | 95,0       | 95,0      | 80,0       | 95,0       | 100,0      | 100,0     | 88,64      | 100,0         | 105,3                             | 105,3                                      | 5,3                              | 12,8       |

Berdasarkan tabel diatas, pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir, **T** Target indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik pada triwulan II adalah 95 Persen dan target pada tahun 2025 adalah 95 Persen, Realisasi indikator ini pada triwulan II adalah 100 Persen atau setara 105,3% dari target triwulan II dan setara 105,3% terhadap target tahun 2025, Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,3% dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ppada periode yang sama maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 12,8%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Logistik pada triwulan II, antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan.

### 3.2.3.2. Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)

Jumlah temuan BPK atas jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Logistik atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 100%. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024.

Tabel 10. Target dan capaian IK 8

| Indikator Kinerja                                                    | Target     |           |            |            | Realisasi  |           |            |               | % Realisasi Terhadap Target TW II | % Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025 | % Pertumbuhan Terhadap Realisasi |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                                                      | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Tahun 2025 | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Sd TW II 2025 |                                   |                                            | TW I 2025                        | TW II 2024 |
| Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik | -          | -         |            | 100,0      | -          | -         | -          | -             | -                                 | -                                          | -                                | -          |

Berdasarkan tabel diatas penilaian indikator Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 100%, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode Triwulan II. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2025. Adanya persamaan target antara tahun 2024 dengan tahun 2025 yaitu 100.

### 3.2.3.3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2025, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Tabel 11. Target dan capaian IK 9

| Indikator Kinerja                                                                             | Target     |           |            |            | Realisasi  |           |            |               | % Realisasi Terhadap Target TW II | % Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025 | % Pertumbuhan Terhadap Realisasi |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                                                                               | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Tahun 2025 | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Sd TW II 2025 |                                   |                                            | TW I 2025                        | TW II 2024 |
| Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik | -          | -         |            | 81,0       | -          | -         | -          | -             | -                                 | -                                          | -                                | -          |

Berdasarkan tabel diatas penilaian indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 81%, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode Triwulan II. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan

tahun 2025. jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat peningkatan target tahun 2025 yaitu sebesar 1 %.

#### 3.2.3.4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)

Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target Direktorat Logistik sebesar 86. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024.

Tabel 12. Target dan capaian IK 10

| Indikator Kinerja                                               | Target     |           |            |            | Realisasi  |           |            |               | % Realisasi Terhadap Target TW II | % Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025 | % Pertumbuhan Terhadap Realisasi |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                                                 | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Tahun 2025 | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Sd TW II 2025 |                                   |                                            | TW I 2025                        | TW II 2024 |
| Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik | -          | -         | -          | 86,0       | -          | -         | -          | -             | -                                 | -                                          | -                                | -          |

Berdasarkan tabel diatas penilaian indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 86%, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode Triwulan II. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2025. jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat peningkatan target tahun 2025 yaitu sebesar 2,3 %.

#### 3.2.3.5. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang

menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bag. SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKP Penyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa.

Indeks profesionalitas ASN Direktorat Logistik tahun 2025 ditargetkan sebesar 87. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2024 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2025. Perhitungannya adalah semesteran.

Tabel 13. Target dan capaian IK 11

| Indikator Kinerja                                            | Target     |           |            |            | Realisasi  |           |            |               | % Realisasi Terhadap Target TW II | % Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025 | % Pertumbuhan Terhadap Realisasi |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                                              | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Tahun 2025 | TW II 2025 | TW I 2025 | TW II 2024 | Sd TW II 2025 |                                   |                                            | TW I 2025                        | TW II 2024 |
| Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik | 82,00      | -         | 75,00      | 87,00      | 84,65      | -         | 79,63      | 84,65         | 103,2                             | 97,3                                       | -                                | 6,3        |

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir, target indikator Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik pada triwulan II adalah 82 Indeks dan target pada tahun 2025 adalah 87 Indeks, Realisasi indikator ini pada triwulan II adalah 84,65 Indeks atau setara 103,2% dari target triwulan II dan setara 97,3% terhadap target tahun 2025, realisasi triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena perhitungannya dimulai pada triwulan II namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ppada periode yang sama maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 6,3%.

### 3.3. Realisasi Anggaran Direktorat Logistik

Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 02 Desember 2024, Direktorat Logistik mempunyai Pagu awal Rp.5.856.950.000,-. Dan berdasarkan tindaklanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dan DIPA Rev 1 Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 22 Februari 2025, Direktorat Logistik mendapatkan pagu sebesar Rp. 1.797.575.500,- dengan tagging blokir sebesar Rp. 1.114.962.500,- sehingga pagu efektif setelah efisiensi sebesar Rp.682.613.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp 472.698.148,- atau sebesar 69,25% terhadap pagu setelah efektif efisiensi.(sumber data Sakti SP2D)

Adapun tabel realisasi anggaran Direktorat Logistik sebagai berikut :

Tabel 25. Realisasi anggaran Direktorat Logistik per 30 Juni 2024

| No           | Rincian Ouput                                                                               | Blokir Automatic Adjusment (Rp) | Realisasi (Rp)     | Sisa Anggaran (Rp) | Persentase realisasi dari pagu setelah AA (%) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 1            | ABR.001. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok                                     | 48.855.000                      | 33.480.507         | 42.654.727         | 87,30                                         |
| 2            | AEE.001 Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan dan distribusi                        | 151.045.000                     | 63.761.892         | 103.410.425        | 68,46                                         |
| 3            | BDG.001 Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka penguatan sistem logistik                     | 86.495.000                      | 49.008.100         | 59.661.500         | 68,97                                         |
| 4            | BMA.001 Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP                                          | 90.680.000                      | 83.393.905         | 83.393.905         | 91,96                                         |
| 5            | PBR.001 Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas | 71.758.000                      | 66.190.130         | 68.574.130         | 95,56                                         |
| 6            | QDH.001 Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA)        | 103.948.000                     | 16.080.596         | 18.886.796         | 18,16                                         |
| 7            | QEG.001 Sarana Penyimpanan Produk KP                                                        | 129.832.000                     | 66.290.515         | 96.116.665         | 74,03                                         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                             | <b>682.613.000</b>              | <b>472.698.148</b> | <b>209.914.852</b> | <b>69,25</b>                                  |

(sumber : Sakti)

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari April sampai dengan Juni 2025. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 107,62. Pencapaian nilai kinerja organisasi periode sampai dengan Triwulan II diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen); target 9,5 Persen; capaian 15,15 Persen atau 120% dari target yaitu penambahan pelaku usaha yang mengimplementasikan STELINA sebanyak 20 pelaku usaha
- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Persen); target 8 Persen; capaian 8 Persen atau 100% dari target yaitu sebanyak 7 pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, uji petik penilaian CDIB, dan pendampingan dalam menyusun panduan CDIB, yaitu Gudang Samudra, Gumuk Joni Sagala (GJS), PT. Citra Perisasi Lintansindo (CPL), CV. Nuraeni, UD. Optimis, PT. Indah Bestari Permai, dan PT. Jaring Aruna Dagang Indonesia Cab. Kotabaru.
- IKK Kinerja Logistik Ikan (Indeks); target 72 Indeks; capaian 72,53 Indeks atau 100,74% dari target\*\*\* yaitu Metode pengukuran Indeks Kinerja Logistik yang dilakukan secara online menggunakan media *google form* dan pertama kalinya dilakukan pengukuran moda darat (Koridor Medan – Jakarta) serta berdasarkan hasil penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) dengan mempertimbangan 8 koridor.
- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku; target 10 Persen; capaian 11,7 Persen atau 117% dari target yaitu penambahan pelaku usaha yang telah Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku sebanyak 12 pelaku usaha.
- IKK Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri; target 90 Persen; capaian 97,3 Persen atau 108,11% dari target \*\*\* yaitu berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan dalam negeri semester 2.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik; target 95 Persen; capaian 100 Persen atau 105,26% dari target yaitu Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode triwulan II Tahun 2025 lingkup Direktorat Logistik dari 21 jumlah rekomendasi telah tindak lanjut dengan tuntas.
- IKK Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik (Indeks); target 82 Indeks; capaian 84,65 Indeks atau 103,23% dari target;

\*\*\* Prognosa

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan II Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

## 1. Lampiran

### 1.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Logistik



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [persuratan.pds@kkp.go.id](mailto:persuratan.pds@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DIREKTORAT LOGISTIK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Berny A. Subki**  
Jabatan : Direktur Logistik

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Budi Sulistiyo**  
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing  
Produk Kelautan dan Perikanan

Pihak Kesatu,  
Direktur Logistik

**Budi Sulistiyo**

**Berny A. Subki**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DIREKTORAT LOGISTIK**

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                              | TARGET |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.               | Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan                                                              | 1.                         | Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketelusuran Produk Perikanan (Persen)                             | 27,2   |
|                  |                                                                                                                     | 2.                         | Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Persen)   | 20     |
| 2.               | Meningkatnya Kinerja Logistik Ikan Dalam Negeri                                                                     | 3.                         | Kinerja Logistik Ikan (Indeks)                                                                                               | 72     |
|                  |                                                                                                                     | 4.                         | Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku (Persen)                                  | 20     |
|                  |                                                                                                                     | 5.                         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri (Persen)                                                      | 90     |
|                  |                                                                                                                     | 6.                         | Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik (Persen)                                                                    | 80     |
| 3.               | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | 7.                         | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen) | 95     |
|                  |                                                                                                                     | 8.                         | Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)                                                | 100    |
|                  |                                                                                                                     | 9.                         | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)                       | 81     |
|                  |                                                                                                                     | 10.                        | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)                                                      | 86     |
|                  |                                                                                                                     | 11.                        | Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)                                                        | 87     |

Data Anggaran :

| PROGRAM/KEGIATAN                                      | ANGGARAN (Rp.)       |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b> |                      |
| Logistik Hasil Kelautan Dan Perikanan                 | <b>5.856.950.000</b> |
| <b>Total Anggaran Direktorat Logistik Tahun 2025</b>  | <b>5.856.950.000</b> |

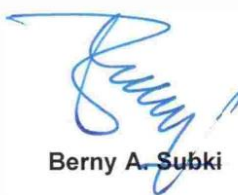
Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing  
Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Kesatu,  
Direktur Logistik



Berny A. Subki